

PROSEDUR SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM PROSES PENAGIHAN DAN PENERIMAAN PENDAPATAN DARI JANUARI-DESEMBER 2024 DI SAMSAT MATARAM

Aditya Andy Putra¹

adityaandyputra11@gmail.com

¹DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

Dina Amalya Putri²

amalyaputridina@staff.unram.ac.id

²DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk proses penagihan dan penerimaan pendapatan pada Samsat Mataram serta peran Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam mendukung efektivitas pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Penelitian dilakukan melalui kegiatan magang yang bersifat deskriptif, mencakup pengamatan proses penagihan mulai dari pendataan kendaraan, penerbitan SKPD, pemberian teguran, hingga pelaksanaan penagihan lapangan. Selain itu, penerimaan pendapatan dianalisis melalui tahapan verifikasi pembayaran, penerbitan bukti pelunasan, pencatatan transaksi ke dalam SIA, hingga penyusunan laporan harian, bulanan, dan tahunan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa Samsat Mataram telah menerapkan prosedur penagihan dan penerimaan pendapatan secara sistematis, akuntabel, dan terintegrasi. Penggunaan SIA berperan penting dalam meningkatkan akurasi pencatatan, mempermudah rekonsiliasi, serta memperkuat transparansi pengelolaan keuangan daerah. Laporan ini menegaskan bahwa proses yang berjalan dengan baik mampu menunjang optimalisasi PAD serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas layanan dan pengembangan sistem di masa mendatang.

Kata Kunci: Prosedur, Sistem Informasi, Proses Penagihan, Penerimaan Pendapatan

ABSTRACT

This study aims to tax collection and revenue acceptance processes at the Mataram Samsat Office, as well as the role of the Accounting Information System (AIS) in supporting the effectiveness of managing Motor Vehicle Tax (PKB), Motor Vehicle Transfer Fee (BBNKB), and Mandatory Traffic Accident Insurance Contribution (SWDKLLJ). The study was conducted through a descriptive internship, observing the stages of tax collection, including vehicle data processing, issuance of SKPD, delivery of tax reminders, and field collection activities. Revenue acceptance was examined through payment verification, issuance of proof of payment, transaction recording within the AIS, and the preparation of daily, monthly, and annual reports. The findings show that Mataram Samsat implements collection and revenue procedures systematically, accountably, and in an integrated manner. The use of AIS significantly improves the accuracy of financial records, facilitates reconciliation, and strengthens transparency in regional revenue management. This report concludes that well-implemented procedures

support the optimization of regional revenue and provides recommendations for improving service quality and system development in the future.

Keywords: *Procedure, Information System, Collection Process, Revenue Receipt*

PENDAHULUAN

Sistem informasi akuntansi merupakan komponen organisasi yang berfungsi mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyampaikan informasi keuangan yang relevan untuk mendukung pengambilan Keputusan (Baradiwan, 2019). Agar informasi yang dihasilkan tidak menyesatkan, sistem ini harus berlandaskan prinsip-prinsip yang tepat (Abdul Manan & Sri Hidayati, 2020). Susilatri (2017) mendukung pernyataan tersebut dengan menilai kinerja sistem informasi melalui dua pendekatan, yaitu tingkat kepuasan dan pemakaian sistem oleh pengguna. Perkembangan sistem informasi akuntansi di lingkungan SAMSAT turut meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. SAMSAT sendiri merupakan singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Abdul Manan & Sri Hidayati, 2020).

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) merupakan bentuk kerja sama terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat dalam satu kantor. Melalui kolaborasi ini, Samsat menyelenggarakan penerbitan STNK dan TNKB yang terkait dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta SWDKLLJ dalam satu tempat.

Samsat Mataram sebagai UPTB di bawah Bappenda Provinsi NTB memiliki peran strategis dalam menghimpun PAD melalui pemungutan PKB, BBNKB, dan SWDKLLJ. Laporan kinerja Bappenda menunjukkan bahwa pajak kendaraan merupakan penyumbang PAD terbesar, sehingga efektivitas pelayanan Samsat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan pendapatan daerah (Soselisa & Puturu, 2021).

Sumber penghasilan pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu penerimaan pajak yang mempengaruhi tingginya pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi dari penerimaan PKB melalui berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Wardani dan Asis, 2017).

Pelayanan publik yang dilakukan pemerintah bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk layanan perpajakan. Kesadaran akan pentingnya layanan yang berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat menuntut adanya inovasi pelayanan yang sesuai harapan. Kualitas layanan publik menjadi tolok ukur keberhasilan instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Wardani & Asis, 2017).

Sistem informasi memiliki peran penting dalam bidang akuntansi, karena pada dasarnya tujuan utama akuntansi adalah untuk menyediakan informasi untuk para pengambil keputusan (Puspitaningtyas, 2018). Dari perspektif pengelolaan keuangan, keberadaan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) menjadi sangat penting dalam mendukung proses penagihan dan penerimaan pendapatan. SIA berfungsi untuk mengolah data keuangan dan menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan dapat diandalkan bagi pengambilan keputusan (Lopa *et al*, 2025).

TINJAUAN LITERATUR

Prosedur

Prosedur adalah langkah-langkah kerja yang tersusun sistematis untuk memastikan kegiatan dilakukan secara konsisten dan efisien (Puspitawati & Anggadini; Mulyadi 2011:23). Prosedur membantu standarisasi pekerjaan berulang serta menjadi pedoman dalam pengendalian internal organisasi. Menurut Mulyadi (2001) karakteristik prosedur di antaranya:

- a. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi.
- b. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan-pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.
- c. Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana.
- d. Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.
- e. Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan untuk kebutuhan pengambilan keputusan. Mulyadi (2008:3) menyebutkan bahwa SIA terdiri dari formulir, catatan, dan laporan yang dirancang untuk menghasilkan informasi bagi manajemen. Hopwood (2008:1) mendefinisikannya sebagai kumpulan sumber daya manusia dan perangkat yang mengubah data akuntansi menjadi informasi yang bermanfaat. Menurut Marshall B. Romney dan Paul John S (2010:3), fungsi penting sistem informasi akuntansi dalam suatu organisasi, yaitu :

1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas- aktivitas tersebut, agar pihak manajemen, para pegawai dan pihak eksternal yang berkepentingan dapat meninjau ulang hal-hal yang telah terjadi.
2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga asset-aset organisasi, termasuk data organisasi untuk memastikan bahwa data tersebut saat dibutuhkan, akurat, dan handal.
4. Dari uraian diatas fungsi sistem informasi akuntansi sangat penting bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta berguna untuk menjaga asset perusahaan.

Penagihan dan Penerimaan Pendapatan

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan untuk memastikan wajib pajak melunasi kewajibannya, termasuk biaya penagihan (Mardiasmo). Dalam konteks Samsat, penagihan dilakukan oleh Bapenda NTB bekerja sama dengan Polri dan Jasa Raharja melalui sistem pelayanan terpadu (SAMSAT). Dan penerimaan pendapatan Penerimaan pendapatan di Samsat Mataram adalah seluruh penerimaan kas daerah yang berasal dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dilakukan oleh wajib pajak melalui sistem pelayanan samsat. Berikut fungsi dari penagihan dan penerimaan pendapatan:

1. Menerima pembayaran pajak dan sumbangan wajib dari masyarakat, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
2. Melakukan pencatatan transaksi penerimaan ke dalam sistem informasi akuntansi Samsat agar seluruh penerimaan tercatat secara tepat dan akurat.
3. Mengidentifikasi wajib pajak yang menunggak melalui data kendaraan bermotor yang belum melunasi pajaknya.

4. Menyampaikan surat pemberitahuan atau teguran kepada wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan bermotor.

METODE

Laporan magang ini dalam bentuk deskriptif. Kegiatan magang ini dilakukan selama 4 (empat) bulan, terhitung mulai tanggal 1 September 2025 sampai dengan bulan Desember 2025. Waktu kegiatan magang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jadwal kerja Samsat Mataram yaitu hari Senin hingga Sabtu dengan ketentuan hari Senin hingga Kamis pukul 07.30-16.00 WITA, hari Jumat 7.30-11.00 WITA, dan hari Sabtu pukul 08.00-14.00 WITA.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama menjalani program magang di Samsat Mataram yaitu sebagai berikut:

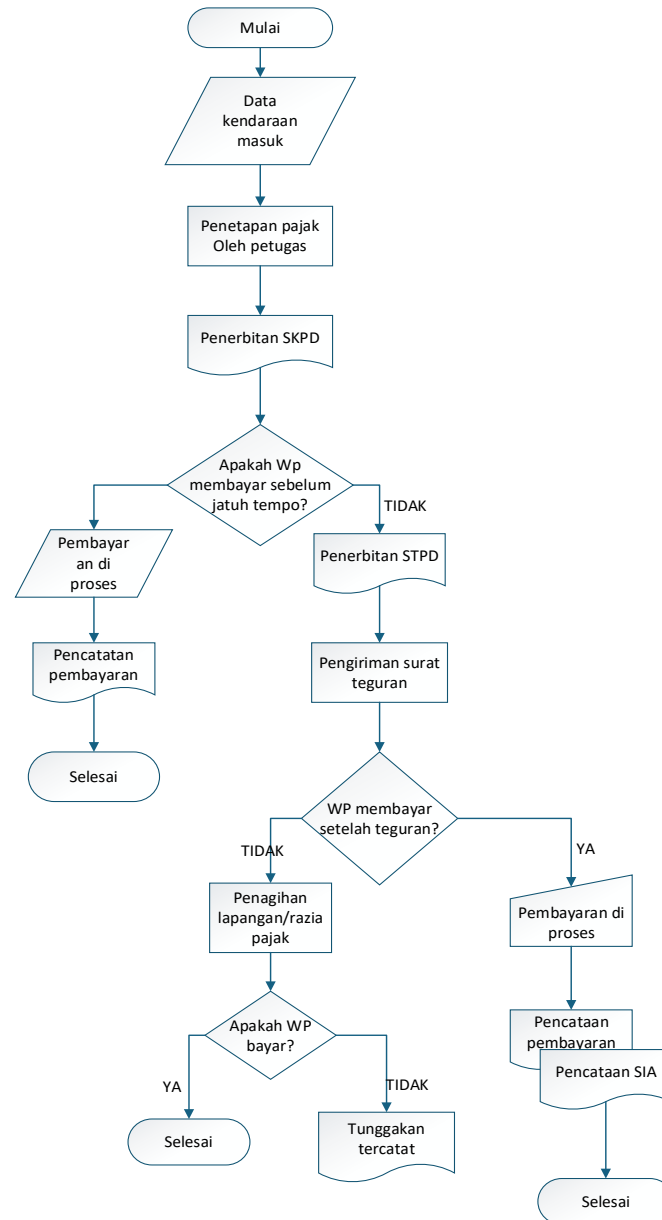
1. Penulis melaksanakan kegiatan apel pagi.
2. Penulis melakukan pengenalan dan beradaptasi dengan cara kerja, untuk membantu pekerjaan yang ada di ruangan P3 Samsat Mataram.
3. Penulis mencari informasi terkait data kendaraan bermotor.
4. Penulis berpartisipasi dengan tugas yang diberikan.
5. Penulis melakukan validasi data-data kendaraan bermotor, untuk yang aktif dan tidak aktif.
6. Penulis berpartisipasi dalam menghantar surat teguran untuk yang belum bayar pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur penagihan pajak kendaraan bermotor dalam pengertiannya Penagihan pada Samsat Mataram merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk memastikan wajib pajak kendaraan bermotor memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sesuai ketentuan yang berlaku. Proses ini menjadi salah satu fungsi penting dalam mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat sektor pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah daerah.

Pelaksanaan penagihan diawali dengan kegiatan pengolahan dan verifikasi data kendaraan yang tercatat memiliki tunggakan pajak. Data tersebut diperoleh melalui sistem informasi yang dimiliki oleh Samsat, kemudian dianalisis untuk menentukan wajib pajak yang perlu diberikan tindakan penagihan. Setelah data tunggakan teridentifikasi, langkah berikutnya adalah penerbitan dan pengiriman Surat Teguran Pajak Daerah (STPD) yang berfungsi sebagai peringatan awal agar wajib pajak segera melunasi kewajibannya sebelum dikenakan tindakan penagihan lanjutan. Apabila dalam jangka waktu tertentu wajib pajak tidak merespons teguran tersebut, maka Samsat Mataram melaksanakan penagihan lanjutan melalui pendekatan langsung di lapangan.

Dalam proses penagihan pajak kendaraan bermotor ini memiliki tantangan dalam proses penagihannya, Tantangan dalam proses penagihan pajak antara lain muncul ketika wajib pajak pindah alamat tanpa melakukan pembaruan data, sehingga petugas kesulitan mengirimkan surat teguran maupun melakukan penagihan langsung. Tantangan lainnya meliputi data kendaraan yang belum mutakhir, kendala komunikasi dengan wajib pajak, keterbatasan petugas lapangan, hingga kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak. Berikut prosedur penagihan pajak kendaraan bermotor:



Gambar 1. Prosedur Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

Berikut uraian terkait flowchart di atas tentang prosedur penagihan pajak bermotor:

1. Data kendaraan masuk
Pada tahap ini, petugas mengumpulkan dan memverifikasi identitas kendaraan yang menjadi objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Data tersebut menjadi dasar dalam menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.
2. Penetapan pajak oleh petugas
Setelah data kendaraan diverifikasi, petugas melakukan penetapan pajak, yaitu menghitung kewajiban pajak tahunan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Penerbitan SKPD

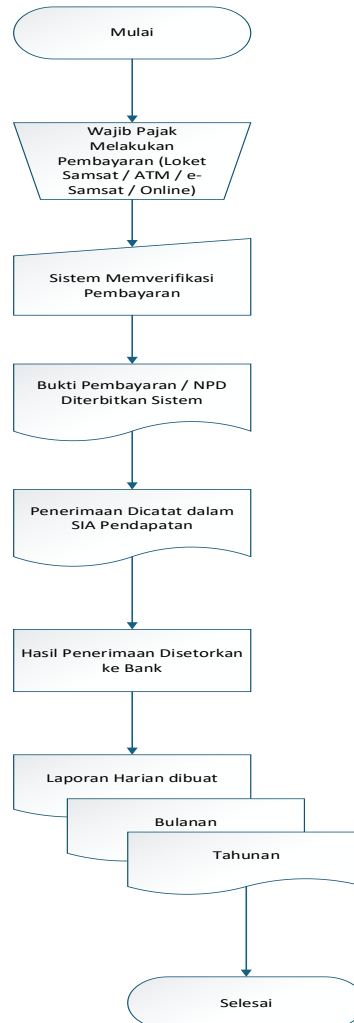
Hasil penetapan pajak tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang menjadi dokumen resmi bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran.

4. Pembayaran di proses
Apabila wajib pajak membayar tepat waktu, petugas akan langsung memproses pembayaran tersebut.
5. Pencatatan pembayaran
Setelah pembayaran di proses petugas melakukan pencatatan pembayaran sehingga proses dinyatakan selesai.
6. Penerbitan STPD
Apabila wajib pajak tidak membayar sebelum jatuh tempo, maka Samsat Mataram menerbitkan Surat Teguran Pajak Daerah (STPD).
7. Pengiriman surat teguran
Surat teguran ini dikirimkan berdasarkan data hasil pemantauan pada database kendaraan masuk, di mana setiap kendaraan yang tidak membayar pajak tepat waktu akan terdaftar sebagai objek penagihan. Setelah surat teguran dicetak, petugas melakukan pendistribusian ke alamat wajib pajak sesuai yang tercantum pada dokumen kendaraan.
8. Penagihan lapangan/razia pajak
Jika wajib pajak tidak menindaklanjuti teguran, maka dilanjutkan dengan penagihan lapangan atau razia pajak. Pada kegiatan ini, petugas turun langsung untuk melakukan pemeriksaan fisik kendaraan yang menunggak pajak dan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran.
9. Tunggakan tercatat
Sistem mendeteksi bahwa wajib pajak belum melakukan pembayaran hingga melewati jatuh tempo, kemudian mencatat status kendaraan sebagai tunggakan yang harus ditindaklanjuti.
10. Pembayaran di proses
Apabila wajib pajak membayar setelah teguran, petugas akan langsung memproses pembayaran tersebut.
11. Pencatatan pembayaran
Setelah pembayaran di proses petugas melakukan pencatatan pembayaran sehingga proses dinyatakan selesai.
12. Pencatataan SIA
Petugas melakukan pencatatan transaksi ke dalam Sistem Informasi Akuntansi untuk memastikan data pembayaran dan penagihan tercatat secara lengkap, akurat, dan terdokumentasi.

Selanjutnya Prosedur penerimaan pendapatan, Penerimaan pendapatan pada Samsat Mataram merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan proses penerimaan, pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan pendapatan daerah yang berasal dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta jenis penerimaan lainnya yang menjadi kewenangan lingkungan Samsat.

Penerimaan pendapatan dimulai ketika wajib pajak melakukan pembayaran kewajiban pajaknya di loket pelayanan Samsat. Pada tahap ini, petugas memverifikasi data kendaraan dan mengecek besaran pajak yang harus dibayarkan. Setelah transaksi dinyatakan benar, pembayaran diproses, dan wajib pajak menerima tanda bukti pelunasan seperti Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP). Selanjutnya, transaksi tersebut dicatat ke dalam sistem informasi pendapatan daerah, seperti Sistem Informasi Akuntansi (SIA), untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data keuangan.

Secara keseluruhan, penerimaan pendapatan pada Samsat Mataram memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Melalui sistem penerimaan yang tertib, akurat, dan transparan, Samsat Mataram mampu mengoptimalkan pendapatan daerah sekaligus memberikan pelayanan yang lebih profesional kepada masyarakat.



Gambar 2. Prosedur Penerimaan Pendapatan

Berikut uraian terkait flowchart di atas tentang prosedur penerimaan pendapatan:

1. **Wajib pajak Melakukan Pembayaran (Loket samsat/ATM/e-samsat/online)**
Proses penerimaan pendapatan pada Samsat Mataram dimulai ketika wajib pajak melakukan pembayaran atas kewajiban pajaknya. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti loket pelayanan Samsat, ATM, e-Samsat, atau kanal pembayaran online lainnya. Pada tahap ini, wajib pajak memasukkan data atau nomor identitas kendaraan sehingga sistem dapat mengenali transaksi yang sedang dilakukan.
2. **Sistem memverifikasi pembayaran**
Setelah pembayaran dilakukan, sistem melakukan verifikasi pembayaran. Verifikasi ini mencakup pengecekan kecocokan data kendaraan, nominal pajak yang dibayarkan, status

jatuh tempo, serta memastikan bahwa transaksi dilakukan melalui kanal resmi yang telah terintegrasi dengan Samsat. Proses verifikasi ini penting untuk mencegah kesalahan pencatatan dan memastikan bahwa setiap pembayaran valid secara administratif.

3. Bukti pembayaran/NPD diterbitkan system

Setelah proses verifikasi selesai, sistem akan menerbitkan bukti pembayaran atau Nota Penerimaan Daerah (NPD). Bukti ini merupakan dokumen resmi yang menandakan bahwa kewajiban pajak telah diselesaikan oleh wajib pajak. Bagi transaksi yang dilakukan di loket, bukti pembayaran dicetak dan diberikan langsung kepada wajib pajak, sedangkan untuk transaksi online, bukti pembayaran dapat diunduh atau diterima melalui aplikasi atau email.

4. Penerimaan dicatat dalam SIA pendapatan

Tahap selanjutnya adalah pencatatan penerimaan ke dalam Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Pendapatan. Pencatatan ini dilakukan secara otomatis atau manual untuk memastikan bahwa seluruh transaksi pembayaran masuk ke dalam basis data penerimaan daerah. Pencatatan SIA berfungsi untuk menyediakan data yang akurat sebagai bahan pelaporan dan rekonsiliasi keuangan.

5. Hasil penerimaan disetorkan ke bank

Setelah data penerimaan dicatat, hasil penerimaan disetorkan ke bank yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Proses penyetoran ini memastikan bahwa pendapatan yang diterima oleh Samsat tidak hanya tercatat dengan benar tetapi juga tertata secara keuangan sesuai ketentuan pengelolaan kas daerah.

6. Laporan harian dibuat

Kemudian, petugas melakukan penyusunan laporan harian. Laporan ini berisi rincian transaksi yang terjadi pada hari tersebut, termasuk jumlah penerimaan, jenis transaksi, dan saldo yang disetorkan.

7. Bulanan

Laporan harian selanjutnya direkap menjadi laporan bulanan, yang memberikan gambaran lebih luas mengenai realisasi penerimaan selama satu bulan berjalan.

8. Tahunan

Pada akhir tahun, seluruh data penerimaan dihimpun dan disusun menjadi laporan tahunan. Laporan ini menggambarkan total realisasi penerimaan pendapatan dari sektor PKB, BBNKB, dan pendapatan lain selama satu tahun serta menjadi dasar evaluasi dan perencanaan pendapatan daerah pada periode berikutnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Proses penagihan dan penerimaan pendapatan di Samsat Mataram telah berjalan sistematis, terintegrasi, dan sesuai ketentuan. Penagihan dilakukan melalui pendataan kendaraan, penetapan pajak, penerbitan SKPD, hingga penagihan lanjutan seperti STPD dan razia. Penerimaan pendapatan meliputi verifikasi pembayaran, penerbitan bukti bayar, pencatatan melalui SIA, penyetoran ke bank, serta penyusunan laporan. Pelaksanaan ini menunjukkan adanya akuntabilitas, ketertiban administrasi, dan transparansi, didukung sistem informasi yang meningkatkan akurasi pencatatan dan rekonsiliasi. Secara keseluruhan, Samsat Mataram berkontribusi optimal terhadap peningkatan PAD.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas proses penagihan dan penerimaan pendapatan, Samsat Mataram dapat memperkuat kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai kewajiban pembayaran pajak, pemanfaatan layanan digital, serta konsekuensi keterlambatan pembayaran. Selain itu, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi akuntansi perlu terus ditingkatkan agar proses pencatatan dan pelaporan pendapatan dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan minim kendala teknis. Kegiatan penagihan lapangan juga sebaiknya dilaksanakan secara lebih teratur dan terjadwal untuk mengurangi jumlah tunggakan pajak kendaraan

bermotor. Peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan rutin sangat diperlukan agar seluruh petugas mampu mengikuti perkembangan teknologi yang digunakan dalam layanan Samsat. Di samping itu, peningkatan fasilitas pelayanan seperti kenyamanan ruang tunggu maupun optimalisasi loket pelayanan dapat membantu mempercepat alur layanan dan meningkatkan kepuasan wajib pajak. Dengan penerapan saran tersebut, diharapkan pelaksanaan penagihan dan penerimaan pendapatan di Samsat Mataram dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.” Ini akan membuat bagian saran terasa lengkap.

REFERENSI

- Abdul Manan & Sri Hidayati. 2020. “7-Article Text-40-1-10-20220107 (1).” 1(November).
- Collins, Sean P., Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A. Jenkins, Karen F. Miller, Christy Kampe, and Javed Butler. 2021. “No Title No Title No Title No Title.” 167–86.
- Lopa, Zulfadhli Lutfi A., Taufik Hidayat B. Tahawa, and Edy Fitriawan Syahadat. 2025. “Analisis Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kab. Majene).” *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)* 7(2):178–98.
- Soselisa, Hendry Ch, and Diana Puturuhi. 2021. “Penerapan Prinsip New Publik Service Dalam Pelayanan STNK Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.” *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* 2(2):315–30. doi:10.51135/publicpolicy.v2.i2.p315-330.
- Wardani, Dewi Kusuma, and Moh. Rifqi Asis. 2017. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Program SAMSAT Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus WP PKB Di SAMSAT Corner Galeria Mall Yogyakarta).” *Akuntansi Dewantara* 1(2):106–16.